



PENINGKATAN WAWASAN KEBANGSAAN UNTUK MEMBENTUK ADAB DAN MENGATASI KRISIS KEDIRIAN PUBLIK MELALUI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Anang Dony Irawan^{1*}

Universitas Muhammadiyah Surabaya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received 8 Januari 2025
Accepted 21 Maret 2025
Available online 18 April 2025

Kata Kunci:

Pendidikan
Kewarganegaraan; Etika
Publik; Identitas Nasional;
Wawasan Nasional.

Keywords:

Civic education; Public
Etiquette; National Identity;
National Insight.

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara yang sangat menghargai tentang adab publik sesama manusia, namun dalam pengimplementasiannya sering berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam penguatan kecerdasan kewarganegaraan di Indonesia dimana didalam pemebelajarannya terkandung bahasan tentang adab publik di masyarakat, kecerdasan kewarganegaraan yaitu kemampuan individu untuk berperan aktif menjadi warga negara atau masyarakat dalam suatu sistem kehidupan yang kompleks berdasarkan identitas normatif masing-masing individu. Kecerdasan kewarganegaraan harus diimbangi dengan adab public yang baik agar menjadi tonggak keberlanjutan nasional. Tujuannya yaitu untuk menjadikan para warga negara Indonesia lebih cerdas dalam berfikir maupun berperilaku bagi diri sendiri, orang lain, maupun untuk negara. Dalam mencapai target keberhasilan kecerdasan kewarganegaraan, perlu adanya langkah-langkah untuk mewujudkannya, seperti melalui metode pembelajaran

controversial issues, metode pembelajaran project citizen, dan membangun budaya literasi. Dari pengimplementasian metode tersebut dapat dilakukan melalui pembelajaran kewarganegaraan berdasarkan Pancasila, karena Pancasila sendiri menjadi landasan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa Pendidikan kewarganegaraan sangat memiliki kontribusi bagi kecerdasan kewarganegaraan khususnya implementasi adab publik di masyarakat. Jurnal ini mengangkat tentang kecerdasan kewarganegaraan khususnya adab publik pada bidang Pendidikan kewarganegaraan. Dalam penelitian ini digunakan metode eksploratif kualitatif. Didapatkan hasil bahwa adab publik di Indonesia mengalami dekadensi seiring menerjangnya globalisasi ke berbagai aspek kehidupan. Hal ini membuat terjadinya krisis kedirian publik, yang berhubungan dengan jati diri bangsa Indonesia dan identitas nasional.

ABSTRACT

Indonesia is a country that respects the public etiquette of fellow human beings, but in its implementation it is often inversely proportional to what is expected. Citizenship has a strategic role in strengthening citizenship intelligence in Indonesia where the learning contains a discussion of public etiquette in society, Civic Intelligence, namely the ability of individuals to play an active role as citizens or society in a complex life system based on the normative identity of each individual. Citizenship intelligence must be balanced with good public manners so that it becomes a milestone for national sustainability. The goal is to make Indonesian citizens smarter in thinking and behaving for themselves, others, and for the country. In achieving the success target of civic intelligence, it is necessary to take steps to make it happen, such as through controversial issues learning methods, project citizen learning methods, and building a literacy culture. From the implementation of this method, it can be done through learning citizenship based on Pancasila, because Pancasila itself is the basis or guideline in carrying out the life of society, nation, and state. Thus, it can be concluded that civic education greatly contributes to civic intelligence, especially the implementation of public etiquette in society. This journal raises about civic intelligence, especially public etiquette in the field of civic education. This study used qualitative exploratory method. The results show that public etiquette in

* Corresponding author.

E-mail addresses: anangdonyirawan@fh.um-surabaya.ac.id

Indonesia is experiencing decadence as globalization has spread to various aspects of life. This creates a crisis of public self-reliance, which is related to the identity of the Indonesian nation and national identity.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.



1. Pendahuluan

Perkembangan teknologi semakin lama semakin meningkat secara pesat, banyak aspek kehidupan yang terkena dampak dari berkembangnya teknologi mulai sistem informasi bahkan aspek Pendidikan dan moral. Perkembangan teknologi tersebut dikhawatirkan dapat membuat para masyarakat mengalami krisis pendirian publik serta membuat masyarakat kurang memperdulikan tentang kecerdasan kewarganegaraan. *Civic Intelligence* atau kecerdasan kewarganegaraan yaitu kemampuan individu untuk berperan aktif menjadi warga negara atau masyarakat dalam suatu sistem kehidupan yang kompleks berdasarkan identitas normatif masing-masing individu. Kecerdasan kewarganegaraan harus diimbangi dengan adab publik yang baik agar menjadi tonggak keberlanjutan nasional. Kecerdasan Kewarganegaraan dapat didapatkan melalui Pendidikan kewarganegaraan yang berpedoman pada Pancasila karena Pancasila sendiri menjadi landasan atau pedoman dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Tanamal & Siagian, 2020)

Pendidikan kewarganegaraan tidak asing ditelinga masyarakat Indonesia, karena telah dipelajari sejak duduk di bangku sekolah dasar, meskipun dipelajari sejak usia yang tergolong dini, hal tersebut tidak menjamin pengimplementasian yang dilakukan telah dilaksanakan secara optimal, banyak para masyarakat kurang paham mengenai optimalisasi peran Pendidikan kewarganegaraan, khususnya adab publik. Sebagai manusia sudah menjadi keharusan untuk memiliki adab publik yang baik, adab publik yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia sendiri yaitu seperti menghargai sesama, menjaga hak kewajiban individu, menghargai pendapat, dan lain sebagainya. Pendidikan kewarganegaraan memiliki manfaat untuk menciptakan masyarakat yang memiliki wawasan kenegaraan. Selain itu, tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk meningkatkan kecerdasan dalam kewarganegaraan secara intelektual, sosial, dan emosional serta kecerdasan kewargaan secara spiritual (Nugraha, 2019) Dalam kecerdasan kewarganegaraan juga dibutuhkan adab publik yang baik agar pengimplementasiannya lebih optimal. Adab publik bermanfaat untuk menumbuhkan sikap yang baik dalam berperilaku bagi diri sendiri, orang lain, maupun negara sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku di masyarakat. Sudah seharusnya semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali memiliki adab publik yang baik agar toleransi antar masyarakat lebih terjaga.

Di Indonesia sendiri pengimplementasian dari adab publik masih tergolong kurang, dikutip dari berita Kompas.com pada tanggal 18 April 2021, telah terjadi kebocoran soal TPS yang dipergunakan untuk UTBK (Ujian Tulis Berbasis Komputer), artinya segelintir orang masih kurang paham mengenai adab publik yang ada di Indonesia, seperti perilaku menghargai sesama serta perilaku tidak mencontek (Dewi, 2021). Perbuatan tersebut sangat bertolak belakang dengan makna kecerdasan kewarganegaraan dan adab publik, padahal pada masa sekolah telah diajarkan tentang perilaku yang baik sebagai warga negara Indonesia khususnya pelajar, namun pada kenyataannya masih terjadi tindak kecurangan atas pengimplementasian adab public di Indonesia khususnya pada bidang Pendidikan. Dalam hal ini perlu dilakukan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kecerdasan kewarganegaraan khususnya adab publik dan upaya yang dilakukan harus mempertimbangkan pengoptimalan teknologi serta kemampuan masing-masing individu. Dari latar belakang dapatdiketahui tujuan penulisan ini yaitu untuk meningkatkan kecerdasan kewargaan dengan peningkatan wawasan kebangsaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang pada hakekatnya adalah cara ilmiah dalam upaya memperoleh data untuk mengungkapkan tujuan tertentu (Sugiono, 2008). Tahapan ini meliputi pengumpulan data, yang dilanjutkan dengan pengolahan data, dan diakhiri dengan interpretasi. Upaya pengumpulan data diawali dengan studi kepustakaan dengan cara mengeksplorasi berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah mengolah data, tahap terakhir adalah interpretasi. Interpretasi diupayakan agar mampu menjelaskan setiap data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian serta keterkaitan antara setiap fenomena (Arikunto, 2006). Upaya pengumpulan data diawali dengan studi kepustakaan dengan cara mengeksplorasi berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Setelah data terkumpul, data diolah dengan meringkas dan menafsirkan bahasan-bahasan penting pada literatur yang tersedia. Tahap terakhir adalah interpretasi, pada tahap ini diupayakan agar mampu menjelaskan setiap data dan informasi yang diperoleh dari tahapan sebelumnya serta keterkaitan antar sub pembahasan.

Dengan demikian, metode yang digunakan dalam membuat artikel ini adalah eksploratif kualitatif. Pendekatan eksploratif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu dan dipakai manakala kita belum mengetahui (Arikunto, 2006). Sementara itu, penelitian kualitatif digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Melalui pendekatan serta jenis penelitian ini, penulis melakukan studi literatur terhadap jurnal, artikel, dan buku mengenai cara meningkatkan wawasan kebangsaan dari berbagai perspektif dilakukan untuk disintesis lebih lanjut menjadi artikel yang padu.

3. Hasil dan Pembahasan

Wawasan Kebangsaan dan Kaitannya dengan Kecerdasan Kewargaan

Bastaman (Bastaman, 2008) menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang kita terhadap diri sendiri sebagai bangsa yang harus mencerminkan rasa dan semangat kebangsaan (karakter kebangsaan) dan mampu mempertahankan jati dirinya sebagai bangsa dari suatu negara tersebut. Kemudian L.B. Moerdani dalam buku "Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa" (Moerdani, 1991), wawasan kebangsaan memiliki tiga dimensi yang harus dihayati dan diwujudkan secara keseluruhan, agar tumbuh kesadaran berbangsa yang kokoh dan bulat. Ketiga dimensi itu adalah rasa kebangsaan, faham kebangsaan, dan semangat kebangsaan.

Rasa kebangsaan adalah kesadaran bangsa yang tumbuh secara alamiah dalam diri seseorang karena kebersamaan sosial yang berkembang dari kebudayaan, sejarah, dan aspirasi perjuangan. Rasionalisasi rasa kebangsaan akan melahirkan paham kebangsaan, yaitu pikiran-pikiran nasional tentang hakikat dan cita-cita kehidupan dan perjuangan yang menjadi ciri khas bangsa itu. Selanjutnya rasa dan paham kebangsaan secara bersama akan mengobarkan semangat kebangsaan yang merupakan tekad dari seluruh masyarakat bangsa itu untuk melawan semua ancaman dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negara. Wawasan kebangsaan membentuk orientasi, persepsi, sikap, dan perilaku yang dihayati bersama oleh seluruh rakyat bangsa (Wahyono S.K., 2007).

Rasa kebangsaan bukan monopoli suatu bangsa, tetapi ia merupakan perekat yang mempersatukan dan memberi dasar keberadaan (*raison d'entre*) bangsa-bangsa di dunia. Dengan demikian rasa kebangsaan bukanlah sesuatu yang unik yang hanya ada dalam diri bangsa kita karena hal yang sama juga dialami bangsa-bangsa lain. Bagaimana pun konsep kebangsaan itu dinamis adanya. Dalam kedinamisannya, antar-pandangan kebangsaan dari suatu bangsa dengan bangsa lainnya saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Dengan benturan budaya dan kemudian bermetamorfosa dalam campuran budaya dan sintesanya, maka

derajat kebangsaan suatu bangsa menjadi dinamis dan tumbuh kuat dan kemudian terkristalisasi dalam paham kebangsaan.

Perkembangan semangat kebangsaan bangsa Indonesia dapat dibagi menjadi beberapa kurun waktu, yaitu:

1. Zaman perintis. Terjadi pada tahun 1908 yang ditandai dengan kemunculan pergerakan nasional Budi Utomo;
2. Zaman penegas. Terjadi pada tahun 1928 yang ditandai dengan ikrar sumpah pemuda;
3. Zaman pendobrak. Terjadi pada tahun 1945 yang ditandai dengan proklamasi kemerdekaan Bangsa Indonesia.

Wawasan kebangsaan berkedudukan sebagai visi bangsa yang berhubungan erat dengan perjalanan bangsa menuju masa depan. Visi bangsa Indonesia yang sesuai dengan konsep wawasan kebangsaan adalah menjadi bangsa satu kesatuan dengan wilayah yang utuh (Bria, 2017). Ini memiliki makna, diantaranya: Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; Wawasan kebangsaan tidak memberikan tempat kepada patriotisme yang licik; Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan bangsa Indonesia sedemikian rupa sehingga asas semboyan Bhinneka Tunggal Ika dapat dipertahankan; Dengan wawasan kebangsaan yang berlandas pada pandangan pancasila, bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan untuk menjalani misinya di tengah-tengah tata kehidupan di dunia; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur bertekad untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang maju dan mandiri serta sejahtera maupun lahir batin, dan akan sejajar dengan bangsa lain yang sudah maju (Nugriansah, 2020). Melihat nilai-nilai di atas, penghayatan wawasan kebangsaan semestinya tidak cukup hanya dengan memiliki semangat dan menguasai paham kebangsaan, tetapi harus digali lebih dalam sampai ke lubuk hati, sehingga rasa kebangsaan mekar di dadanya. Penghayatan semacam inilah yang akan dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia dan membawanya ke masa depan yang gemilang (Nurfatihmah & Dewi, 2021).

Wawasan kebangsaan mengalami banyak sekali tantangan, salah satunya yakni nasionalisme yang mulai memudar. Hal ini disebabkan karena banyaknya pengaruh budaya dari luar yang terus menggerus budaya bangsa yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa kita tercinta (Rinenggo et al., 2019). Dapat diambil sebagai contoh yang *simple* dan menggambarkan seberapa kecilnya rasa nasionalisme para pemuda, yang pertama yaitu pada saat upacara bendera masih banyak pemuda yang tidak memaknai dengan benar arti upacara tersebut. Padahal, upacara merupakan salah satu wadah untuk menghormati dan menghargai jasa para pahlawan yang telah berjuang dengan keras membebaskan negeri ini dari belenggu penjajahan. Namun, para pemuda seakan sibuk dengan pikirannya sendiri sehingga tidak mengikuti upacara dengan khidmat. Kedua, pada hari-hari besar nasional, seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda, Hari Kartini, Hari Pendidikan Nasional, Hari Pancasila, dan lain - lain, para pemuda saat ini mengartikan hari-hari tersebut sebagai momen peringatan, buktiistensi, dan hiburan semata tanpa menunjukkan adanya rasa nasionalisme dalam diri mereka. Ketiga, dikalangan pelajar sejak dulu hingga sekarang juga sangat menonjol tawuran antar pelajar yang seringkali memakan korban jiwa, baik nyawa dari pelajar itu sendiri maupun orang lain yang berada di sekitar lokasi tersebut. Tak hanya korban nyawa tapi juga material akibat adanya aksi anarkis terhadap rumah penduduk di sekitar lokasi terjadinya tawuran. Berarti hal ini menandakan bahwa semakin menipisnya rasa persatuan antar sesama pelajar yang mengarah pada lunturnya rasa nasionalisme. Generasi muda sekarang juga cenderung meniru budaya luar yang jauh berbeda perbandingannya dengan adat dan istiadat bangsa kita, seperti gaya potongan rambut, cara mengenakan pakaian, gaya dalam berbicara, dan lain-lain. Selain itu, mereka lebih tertarik menggunakan produk buatan luar negeri, karena mereka menganggap bahwa kualitasnya melebihi produk - produk lokal dan mereka juga merasa jika produk lokal tidak mengikuti perkembangan zaman.

Faktor lain dari memudarnya rasa nasionalisme generasi penerus bangsa ini, terutama disebabkan oleh contoh yang tidak benar dan kurangnya edukasi dari generasi sebelumnya yang egois karena cenderung mementingkan kepentingan pribadi diatas kepentingan golongan, agama, bangsa, dan negara. Berbagai faktor lain yaitu, sikap keluarga dan lingkungan sekitar yang tidak mencerminkan rasa nasionalisme sama sekali, banyaknya kasus korupsi oleh pembawa amanah atau wakil rakyat, sistem pemerintahan yang sangat berbeda dengan harapan para pemuda membuat generasi penerus kecewa terhadap kinerja pemerintah yang ada, sikap etnosentris yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, adanya ketertinggalan bangsa Indonesia dari negara – negara lain terutama negara tetangga di berbagai aspek membuat mereka tidak bangga menjadi bagian dari Indonesia, dan adanya paham individualisme budaya barat yang mengikis rasa kebersamaan dalam bermasyarakat. Berbagai pengaruh tersebut memang tidak secara langsung berdampak pada rasa nasionalisme generasi muda. Akan tetapi, apabila dibiarkan secara terus menerus dapat menyebabkan rasa nasionalisme terhadap bangsa akan semakin berkurang atau bahkan menghilang. Maka dari itu, perlu adanya upaya menumbuhkan kembali sikap nasionalisme di kalangan pemuda.

Upaya merajut kembali nasionalisme berlandaskan Pancasila adalah bagian dari perwujudan kecintaan kepada Pancasila yang merupakan konsensus agung para pendiri bangsa Indonesia. Pancasila merupakan perwujudan pengabdian, toleransi, gotong royong dan nilai-nilai luhur yang dianut bangsa Indonesia, yang belakangan memudar seiring menguatnya isu SARA, perbedaan pandangan politik, gerakan separatis, aksi teror, dan kekerasan terhadap sesama anak bangsa lainnya (Rinenggo et al., 2019). Membahas wawasan kebangsaan tidak akan lengkap tanpa adanya civic intelligence (kecerdasan kewargaan). Kecerdasan kewargaan merupakan kemampuan seseorang untuk memainkan peran dirinya secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasiskan identitas normatif bangsa. Seseorang yang memiliki kecerdasan kewarganegaraan akan menunjukkan *performance* sebagai warga negara yang peduli terhadap kondisi sosial, jujur dalam menyikapi berbagai fenomena yang ada, kritis terhadap kondisi yang ada, serta tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dialaminya. Jika kecerdasan kewarganegaraan ini tumbuh subur dalam diri seseorang, maka akan menjadilah dia sosok warga negara yang baik (*good citizenship*).

Warga negara yang dapat memainkan peran penting serta memberikan kontribusi dalam kehidupan berbangsa adalah warga negara yang baik (*good citizenship*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang dalam memainkan perannya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara selalu berpijak pada nilai-nilai konstitusi negara, yang dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizenship*) salah satu hal yang mendasar adalah perlunya dikembangkan kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*). *Civic Intelligence* adalah kemampuan untuk memainkan peran dirinya secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasiskan identitas normatif bangsa. Menurut Winataputra (2012), ada tujuh kecakapan yang harus dibangun untuk membentuk kecerdasan kewarganegaraan (*civic intelligence*); yaitu *civic knowledge*, *civic disposition*, *civic skills*, *civic confidence*, *civic commitment*, *civic competence*, dan *civic culture*. Tujuh kecakapan tersebut haruslah terintegrasi secara harmonis dalam aktifitas berpikir, bersikap, dan bertindak sebagai insan warga negara Indonesia, yang dilandasi oleh nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*). Ketujuh aspek *civic intelligence* tersebut merupakan satu kesatuan dalam proses kejiwaan peserta didik. *Civic knowledge* berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman akan kedudukan dirinya sebagai warga negara, yang memiliki hak dan kewajiban berdasar nilai-nilai konstitusi negara.

Oleh karena itu, warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) akan menjadi seorang warga negara yang berkompeten. Warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) serta nilai-nilai kewarganegaraan (*civic values*) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki rasa percaya diri, sedangkan

warga negara yang telah memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dengan dilandasi oleh nilai - nilai kewarganegaraan (*civic values*) akan menjadi seorang warga negara yang memiliki komitmen kuat. Kemudian warga negara yang memahami dan menguasai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), memahami dan menguasai keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), dengan dilandasi oleh nilai - nilai kewarganegaraan (*civic values*) akan menjadi seorang warga negara yang berpengetahuan, terampil dan berkepribadian (Masrukhi, 2018).

Membahas wawasan kebangsaan tidak akan lengkap tanpa adanya civic intelligence (kecerdasan kewargaan). Kecerdasan kewargaan merupakan kemampuan seseorang untuk memainkan peran dirinya secara proaktif sebagai warga negara dan warga masyarakat dalam tata kehidupan yang kompleks dengan berbasiskan identitas normatif bangsa. Seseorang yang memiliki kecerdasan kewarganegaraan akan menunjukkan performance sebagai warga negara yang peduli terhadap kondisi sosial, jujur dalam menyikapi berbagai fenomena yang ada, kritis terhadap kondisi yang ada, serta tangguh dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dialaminya. Jika kecerdasan kewarganegaraan ini tumbuh subur dalam diri seseorang, maka akan menjadilah dia sosok warga negara yang baik (*good citizenship*).

Dekade ini, akibat globalisasi yang terus-menerus menerjang berbagai aspek kehidupan membuat jati diri bangsa Indonesia ibarat memudar. Maka dari itu, pengembangan kecerdasan kewargaan berbasis Pancasila merupakan kunci integrasi dan kemajuan bangsa dalam menghadapinya. Kecerdasan kewargaan ini bisa dibangun dengan pendalaman dan perluasan wawasan kebangsaan yang berpandangan hidup Pancasila yang dikembangkan dengan semangat gotong-royong (Nurfatihmah & Dewi, 2021).

Adab Publik

Adab merupakan tuntunan atau norma bagaimana seseorang berperilaku, dikaitkan dengan sopan santun (etika/tatakrama). Orang yang beradab paham menempatkan dirinya dan menempatkan orang lain dalam posisi yang seharusnya. Tahu batas mana yang sepatasnya dilakukan juga mengetahui hak dan kewajiban dirinya dan orang lain Adab publik artinya tuntutan bagaimana seseorang berperilaku di depan publik, contohnya seperti ramah, santun, toleran, dan peduli kepada sesama. Dari hal ini, bisa diketahui bahwa adab publik terdiri dari adab di tempat umum dan adab terhadap sesama manusia (Norman, 2020).

Adab di tempat umum dimulai dari hal kecil seperti berpakaian, yang sekarang mulai bertentangan dengan budaya lokal Indonesia dan cenderung mengikuti budaya barat. Masyarakat terutama perempuan banyak yang kurang menutupi aurat sehingga menimbulkan rangsangan bagi lawan jenisnya, dan jelas hal ini membuat suatu permasalahan yang baru seperti kriminalitas dan degradasi moral bangsa. Adab di tempat umum yang lain juga penting untuk ditanamkan kepada setiap warga negara, seperti adab berkendara, adab berjalan di tempat umum, dan adab penggunaan fasilitas umum. Tidak kalah penting adalah adab terhadap sesama manusia, baik yang telah dikenal seperti tetangga maupun orang yang benar-benar asing. Sebagai warga negara yang baik, hendaknya menjaga adab dengan bertutur kata yang baik serta menjaga perasaan orang lain, mengucapkan salam maupun sapaan, saling menghormati dan tolong-menolong, dan sebagainya.

Namun kini, berbagai permasalahan mengenai adab publik muncul satu per satu di media massa. Permasalahan utamanya adalah bahwa perubahan global saat ini telah menyebabkan pergeseran nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tidak dapat dipungkiri fakta dan realitas sosial dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami perubahan dari adab tinggi menjadi adab rendah. Pada kehidupan sehari-hari saja contohnya, permasalahan seperti mobil terserempet tidak diselesaikan secara mufakat tetapi malah dengan baku hantam dan sumpah serapah. Di dunia maya pun demikian, terbukti berdasarkan laporan Digital Civility Index (DCI) baru-baru ini, sopan santun dan adab pengguna internet di Indonesia paling rendah di Asia Tenggara. Nilainya 76 atau terburuk (makin tinggi angkanya, tingkat kesopanan makin buruk), dibandingkan netizen Singapura dengan 59 poin atau paling sopan, disusul Malaysia (63), Filipina (66), Thailand (69) dan Vietnam (72). Faktor

yang paling mempengaruhi kesopanan di Indonesia yakni hoaks dan penipuan yang naik 13 poin ke angka 47 persen dibandingkan tahun 2020, disusul ujaran kebencian yang naik 5 poin menjadi 27 persen dan faktor diskriminasi 13 persen (Suharto, 2021).

Adab tinggi bangsa Indonesia ditunjukkan dalam persepsi religius, seperti pandangan yang terlalu berat ke akhirat. Pandangan yang menyebabkan orang selalu berupaya untuk “bertahan dalam kesulitan”. Kesulitan dipandang sebagai *given* (atau takdir), karena itu tidak dapat diubah. Maka upaya yang dilakukan orang tersebut adalah bagaimana survive di dalam kesulitan itu. Adab rendah harus diliputi dengan menumbuhkan adab tinggi dan tujuan yang kuat (peluang dalam kepatuhan) dengan menemukan kesadaran penuh dan inspirasi manusia yang berorientasi di masa depan. Dari berbagai karya tulis ditegaskan bahwa apa yang tersirat dari ilham manusia adalah kekuatan mistik dalam diri manusia untuk mencapai apa yang dibutuhkannya. Dorongan yang kuat untuk mengembangkan inspirasi manusia dapat diakui, salah satunya adalah syarat untuk berprestasi. Adab publik di negara ini harus dibangun kembali oleh hakikat aslinya. Impor budaya asing dan perilaku yang tidak sesuai dengan kepribadian negara dan cara hidup nusantara harus diberhentikan (Hartono, 2008).

Sejauh ini, pemilu adalah momentum bagi semua warga untuk memperkuat pendirian atas beberapa masalah. yaitu, mentalitas atau keinginan untuk mempertegas persetujuan untuk mengikuti pemerintahan Indonesia sesuai dengan sifat-sifat luhur Pancasila dan untuk menetapkan pandangan dan menetapkan pendirian untuk kelanjutan arah dan orientasi pembangunan. Hal utama dari adab publik untuk diterapkan dalam pendidikan karakter adalah untuk mengembangkan karakter atau personality yang kuat, atau tujuan yang solid sehingga dapat memahami adab tinggi dan tujuan yang solid. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan wahana yang tepat untuk meneguhkan pendidikan pribadi negara dalam menghadapi tantangan abad ke-21.

Krisis Kedirian Publik

Sebuah bangsa sebagai entitas kolektif memiliki semacam kediriannya tersendiri. *Ego strength* dalam konteks kedirian kolektif bernama identitas nasional, yang bisa terbangun karena kebertautan kesadaran kesejarahan, kebersamaan nilai, dan simbol serta kebanggaan bersama sebagai bangsa. Dari sini, bisa diketahui bahwa kedirian publik bisa dikatakan sebagai jati diri bangsa yang berkorelasi dengan identitas nasional (Latif, 2020). Bagi bangsa Indonesia, kedirian ini bisa dikategorikan menjadi tiga, yaitu identitas manusia, identitas nasional, dan integrasi nasional.

Pertama adalah identitas manusia, Manusia merupakan makhluk yang multidimensional, paradoksal dan monopluralistik. Keadaan manusia yang multidimensional, paradoksal dan sekaligus monopluralistik tersebut akan mempengaruhi eksistensinya. Eksistensi manusia selain dipengaruhi keadaan tersebut juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya atau pedoman hidupnya. Pada akhirnya yang menentukan identitas manusia baik secara individu maupun kolektif adalah perpaduan antara keunikan-keunikan yang ada pada dirinya dengan implementasi nilai-nilai yang dianutnya (Hendrizal, S.IP., 2020).

Kedua, Identitas nasional Indonesia bersifat pluralistik (ada keanekaragaman) baik menyangkut sosiokultural ataupun religiusitas. Rinciannya adalah:

1. Identitas fundamental/ideal yaitu Pancasila yang merupakan falsafah bangsa;
2. Identitas instrumental yaitu identitas sebagai alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan. Alatnya berupa UUD 1945, lambang negara, bahasa Indonesia, dan lagu kebangsaan;
3. Identitas religiusitas yaitu Indonesia yang pluralistik dalam agama dan kepercayaan;
4. Identitas sosiokultural yaitu Indonesia yang pluralistik dalam suku dan budaya;
5. Identitas alamiah yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Terakhir, integrasi nasional adalah pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masyarakat yang menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh, yang secara sederhana memadukan Masyarakat - masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu bangsa (Hendrizal, S.IP., 2020).

Krisis multidimensional yang melanda negeri Indonesia, telah membawa perubahan yang sangat signifikan bagi hidup dan kehidupan umat manusia. Banyak orang menawarkan jalan keluar dengan visi yang kabur. Krisis multidimensional yang melanda bangsa dicoba dicari akarnya pada persoalan jati diri. Namun, konseptualisasi jati diri itu sendiri tidak didefinisikan secara jelas. Akibatnya, obat yang diberikan tidak berdasarkan diagnosis penyakit yang cermat. Setelah ukuran kecerdasan diri berbasis intelligence quotient (IQ) dianggap tak memadai menjawab krisis kedirian, program pendidikan dan pelatihan kepribadian berpaling pada pengembangan jenis kecerdasan lain, terutama yang berbasis emotional quotient (EQ) dan spiritual quotient (SQ).

Terlihat jelas bahwa masyarakat Indonesia tidak kekurangan orang dengan IQ tinggi, yang dibuktikan dengan lomba-lomba kancah internasional yang dijuarai. Manusia Indonesia juga relatif memiliki kematangan emosional. Berbagai tradisi budaya Indonesia sudah teruji menanamkan ketahanan emosional, seperti kemampuan pengendalian diri untuk tidak berlebihan (*ngono yo ngono ning ojo ngono*); menjunjung tinggi yang positif, memendam yang negatif (*mikul dhuwur, mendhem jero*); serta ketahanan menghadapi kesulitan. Tidak hanya itu, kecerdasan spiritual juga relative kuat dibuktikan dengan sedikitnya ateis di Indonesia. Sisi terlemah manusia Indonesia justru mencolok pada aspek kedirian bersifat publik. Hal ini mudah dilihat dari bagaimana orang berlatar pribadi baik dengan mudah hanyut dalam arus keburukan begitu terjun ke politik. Kita juga bisa menyaksikan, hampir semua hal bersifat kolektif mengalami dekadensi: partai politik sakit, lembaga perwakilan sakit, birokrasi sakit, aparaturnya penegak hukum dan keamanan-pertahanan sakit, bahkan organisasi keagamaan berskala besar pun mulai menunjukkan gejala sakit.

Krisis pada kedirian yang bersifat publik ini mencerminkan kelalaian dunia pendidikan dan kebudayaan mengembangkan "kecerdasan kewargaan" (*civic intelligence*). Pendidikan terlalu menekankan kecerdasan personal dengan mengabaikan usaha menautkan keragaman kecerdasan personal ke dalam kecerdasan kolektif-kewargaan. Setiap individu dibiarkan menjadi deret "huruf" alfabet tanpa disusun secara kesatuan dalam perbedaan (Bhinneka Tunggal Ika) ke dalam "kata" dan "kalimat" bersama. Akibatnya, banyak manusia baik dan cerdas tidak menjadi warga negara dan penyelenggara negara yang baik dan cerdas (sadar akan kewajiban dan haknya). Padahal, bangsa Indonesia sebagai masyarakat majemuk, dengan pecahan yang banyak jumlahnya, tidak mungkin bisa dijumlahkan menjadi kebaikan bersama kalau tidak menemukan bilangan penyebut yang sama (common denominator) sebagai ekspresi identitas dan kehendak bersama. Oleh karena itu, pendidikan kecerdasan kewargaan berlandaskan Pancasila merupakan jurus pamungkas yang paling dibutuhkan. Pengembangan kecerdasan kewargaan lebih fundamental bagi suatu bangsa yang ingin membebaskan diri dari kolonisasi individualisme yang mendorong kapitalisme dan kolonialisme (Latif, 2015).

Meningkatkan Kecerdasan Kewargaan dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Melalui Pendidikan Kewarganegaraan

Membentuk adab dan mengatasi krisis kedirian publik dibutuhkan suatu solusi, yaitu meningkatkan wawasan kebangsaan melalui pendidikan kewarganegaraan yang berujung pada meningkatnya kecerdasan kewargaan. Pendidikan kewarganegaraan sendiri di Indonesia telah diajarkan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga jenjang perguruan tinggi dan terbukti bahwa ada korelasi antara peningkatan wawasan kebangsaan dengan mata pelajaran atau mata kuliah kewarganegaraan (Sofyan & Sundawa, 2016). Adapun cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keefektifan Pendidikan kewarganegaraan adalah:

1. Metode Pembelajaran *Controversial Issues*.

Fungsi dari penggunaan model pembelajaran *Controversial Issues* adalah agar siswa aktif, kreatif, dan berpikir secara kritis mengenai isu-isu kewarganegaraan yang diberikan oleh guru pada saat proses pembelajaran. Melalui model pembelajaran ini siswa dapat belajar untuk mengemukakan pendapat, mendengarkan pendapat orang lain, mencari informasi, menyadari adanya perbedaan, membangun empati dan pengertian, untuk kemudian mengambil kesimpulan. Dengan ini siswa bisa lebih menyakini apa yang diamati

dan menemukan banyak cara untuk mencari jalan keluar tentang isu-isu kontroversial (Rohani, 2017). Penerapan model pembelajaran ini akan membantu siswa dalam mengembangkan daya intelektual dan keterampilan berkomunikasi secara lisan maupun secara tulisan. Komalsari (2010) mengemukakan bahwa langkah-langkah dalam pembelajaran *Controversial Issues* sebagai berikut:

- Guru atau siswa menanyakan suatu kasus atau isu;
- Guru mempersilahkan siswa untuk berpendapat mengenai isu tersebut. Setiap siswa harus menjelaskan alasan mengenai pendapat yang dia kemukakan;
- Pendapat-pendapat yang berbeda dikelompokkan menjadi isu kontroversial dan dijadikan bahan diskusi kelas;
- Setiap siswa dapat menjadi pro atau kontra suatu pendapat tentang isu kontroversial tersebut disertai alasan. Hal ini dapat memperlihatkan pula kekuatan dan kelemahan pendapat masing-masing;
- Guru tidak perlu mengarahkan kegiatan kelas untuk mendapatkan kesepakatan-kesepakatan;
- Guru dan siswa menarik kesimpulan mengenai kesamaan dan perbedaan perbedaan pendapat yang ada, kelemahan dan keunggulan masing masing pendapat.

2. Model Pembelajaran *Project Citizen*

Model pembelajaran ini dapat melatih *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition* mahasiswa. Menurut Center for Civic Education (CCE) 1998 yang dikutip oleh Lukitoaji, (2016) mengemukakan bahwa pembelajaran *project citizen* adalah terlibatnya mahasiswa dalam keseluruhan proses, dan dengan proses itu mahasiswa difasilitasi dalam mendapatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Model pembelajaran *project citizen* dapat mengembangkan nilai moral mahasiswa, pelaksanaan model pembelajaran ini menjadi sangat penting guna merancang solusi yang tepat dalam mempersiapkan kompetensi warga negara. Langkah-langkah model pembelajaran *project citizen* yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

- Mengidentifikasi masalah
- Memilih masalah untuk bahan kajian kelas
- Mengumpulkan informasi
- Mengembangkan portofolio kelas
- Menyajikan portofolio
- Merefleksi pengalaman belajar.

3. Membangun Budaya Literasi

Target *civic intelligence* bisa tidak tercapai secara sempurna jika masih ada fenomena literasi warga yang kurang, keterbatasan guru dalam mengajar, dan sebagainya. Akibatnya, perilaku-perilaku negatif seperti kemerosotan moral dan ketidakmampuan warga dalam memecahkan masalah, tidak dapat terbendung. Penyebabnya berasal kurangnya literasi dan kurangnya pencarian informasi secara mandiri. Karena ini, wawasan warga menjadi sempit. Apabila wawasan sempit maka akan mengakibatkan keraguan bahkan kekeliruan. Situasi akan terbalik jika literasi sudah menjadi budaya keseharian (Aini, 2017).

4. Simpulan dan Saran

Adab publik di Indonesia mengalami dekadensi seiring menerjangnya globalisasi ke berbagai aspek kehidupan. Hal ini membuat terjadinya krisis kedirian publik, yang berhubungan dengan jati diri bangsa Indonesia dan identitas nasional. Kelalaian bidang pendidikan dan kebudayaan dianggap sebagai faktor yang menyebabkan krisis ini terjadi. Pendidikan terlalu menekankan kecerdasan personal dengan mengabaikan usaha menautkan keragaman kecerdasan personal ke dalam kecerdasan kolektif-kewargaan. Wawasan kebangsaan yang berkolerasi dengan kecerdasan kewargaan terbukti dapat ditingkatkan melalui pendidikan kewarganegaraan. Upaya yang dapat dilakukan untuk menambah

keefektifan pendidikan kewarganegaraan di semua jenjang adalah metode pembelajaran *controversial issues*, metode pembelajaran *project citizen*, dan membangun budaya literasi.

Daftar Rujukan

- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastaman. (2008). *Membangun Kembali Jati Diri Bangsa*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Komalsari, K. (2010). *Pembelajaran kontekstual (konsep dan aplikasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Moerdani, L. B. (1991). *Menegakkan Persatuan dan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Hartono. (2008). Mengembangkan Karakter Diri Adab Karsa Tinggi. *Acta Civicus*, 1(2), 167–168.
- Hendrizal, S.IP., M. P. (2020). Mengulas Identitas Nasional Bangsa Indonesia Terkini. *Jurnal PPPKn & Hukum*, 15(1), 1–21. <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/download/7877/6763>
- Lukitoaji, B. D. (2016). *PEMBINAAN CIVIC DISPOSITION MELALUI MODEL PEMBELAJARAN PROJECT CITIZEN DALAM MATA KULIAH PKn 2 UNTUK MENUMBUHKAN NILAI MORAL MAHASISWA*. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*. 2(2), 1–23.
- Masrukhi. (2018). Pengembangan Civic Intelligence Berbasis Kegiatan Ekstrakurikuler di Sekolah Dasar. *Jurnal Integralistik*, 29(1), 14–15.
- Nugraha, S. (2019). Kecerdasan Emosional dan Perilaku Kewarganegaraan Organisasi pada Pegawai Badan Kepegawaian Daerah. *Business Innovation and Entrepreneurship Journal*, 1(1), 62–67. <https://doi.org/10.35899/biej.v1i1.3>
- Nugriansah, T. H. (2020). Fenomena Prostitusi Online Di Kota Yogyakarta Dalam Perspektif Nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Kewarganegaraan*, 17(1), 28. <https://doi.org/10.24114/jk.v17i1.14208>
- Nurfatihah, S., & Dewi, D. (2021). Implementasi Nilai Pancasila dalam Menumbuhkembangkan Wawasan Kebangsaan di Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 176–183.
- Rohani, S. (2017). Upaya Guru dalam Meningkatkan Civic Knowledge Siswa melalui Model Pembelajaran Controversial Issues pada Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Kelas VIII Sekolah Menengah Pertama Mujahidin Pontianak. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7, 49–59. <https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/pkn/article/view/3548>
- Sofyan, F. S., & Sundawa, D. (2016). Hubungan Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Dengan Peningkatan Wawasan Kebangsaan Dan Semangat Nasionalisme Mahasiswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 24(2), 185. <https://doi.org/10.17509/jpis.v24i2.1455>

- Tanamal, N. A., & Siagian, S. B. U. (2020). Pancasila Sebagai Landasan Visional bagi Spiritualitas Kehidupan Bangsa Indonesia dalam Menangani Intoleransi. *Integritas: Jurnal Teologi*, 2(1), 35–48. <https://doi.org/10.47628/ijt.v2i1.22>
- Wahyono S.K. (2007). Wawasan Kebangsaan Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 12(2). <https://doi.org/10.22146/jkn.22121>
- Winataputra, U. S. (2012). Jati Diri Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Wahana Sistemik Pendidikan Demokrasi: Suatu Kajian Konseptual dalam Konteks Pendidikan IPS. *Jurnal Pendidikan Program Pascasarjana*, 1(1), 39–41.
- Aini, D. N. (2017). *BUDAYA MEMBACA DENGAN MEDIA POHON GELIS (GERAKAN LITERASI SEKOLAH) DALAM MENGEMBANGKAN CIVIC INTELLIGENCE SISWA*. Retrieved from http://repository.upi.edu/31089/4/T_PKn_1502421_Chapter1.pdf. Diakses pada 9 Desember 2021.
- Bria, M. E. (2017). Penguatan Wawasan Kebangsaan Peserta Didik di Daerah Perbatasan Indonesia-Timor Leste Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III*. Diakses pada 9 Desember 2021.
- Dewi, R. K. (2021). *Viral Soal UTBK TPS Diduga Bocor dan Tersebar, Ini Penjelasan LTMPT*. Kompas. Retrieved from <https://www.kompas.com/tren/read/2021/04/18/200400165/viral-soal-utbk-tps-diduga-bocor-dan-tersebar-ini-penjelasan-ltmpt?page=all>. Diakses pada 9 Desember 2021.
- Latif, Y. (2015). *Kecerdasan Kewargaan*. Kompas. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2015/10/06/15000021/Kecerdasan.Kewargaan?page=all>. Diakses pada 10 Desember 2021.
- Latif, Y. (2020). *Asa Indonesia 2021*. Media Indonesia. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/opini/369892/asa-indonesia-2021>. Diakses pada 10 Desember 2021.
- Norman. (2020). *Adab dan Kinerja Organisasi*. Borneo Development Center. Retrieved from <https://www.trainingasik.com/adab-dan-kinerja-organisasi/>. Diakses pada 10 Desember 2021.
- Rinenggo, A., Sari, D. P., Sentosa, R., Candra, S. W. S., & Malik, T. S. (2019). Penguatan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Memperkukuh Jati Diri Bangsa Era Disrupsi. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan IV*. Diakses pada 22 Desember 2021.
- Suharto, N. (2021). *Adab di Ruang Publik*. Kantor Berita Kemanusiaan. Retrieved from <https://www.kbknews.id/2021/05/16/adab-di-ruang-publik/>. Diakses pada 7 Desember 2021.